



Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Effectiveness of Mukim Roles in Government Systems in Aceh Singkil Regency

Azmi¹, Heri Kusmanto² & Isnaini³

- 1) Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
- 3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintahan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparat pemerintah Mukim dan lembaga Mukim.

Kata Kunci: Efektivitas, Mukim, Sistem Pemerintahan, Strategi

Abstract

This research is descriptive research, namely to describe about the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency. There are two problems in this research is to look at the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency and the strategy of Strengthening the presence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. Respondents to see the effectiveness of the role of the Government of Aceh Residents in Aceh Singkil Regency of as many as 33 people, consisting of 11 people, 20 head of Mukim, 1 custom figures and 1 person Scholars. Of research results can be explained that for the effectiveness of the role of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is less effective. Strategies that can be made in strengthening the presence of mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is one of empowering institutions Mukim through partnerships with related technical SKPK. As for the Suggestion of the researcher is to the County Government's budget Team (TAPK) districts of Aceh Singkil Regency to provide sufficient budget operations and strengthen the structure of the Mukim Mukim and implement bimtek to strengthen the knowledge the Government's apparatus and Mukim.

Keyword: Efektivitas, Mukim, System of Government, Strategi.

How to Cite: Azmi, Kusmanto H, Isnaini. (2020). Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1) 2020: 11-21,

*E-mail: azmiazmi@gmail.com



PENDAHULUAN

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural. Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat (Jaffisa, Kadir et.al, 2017). Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di *gampong-gampong* atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Adat di Aceh.

Secara yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan segala simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara *de jure*, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara *de facto*. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan *gampong* dan penyelenggaraan pemerintah *gampong* di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya diakui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata.

Terbentuknya sistem pemerintahan mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap ideal tersebut. Kedudukan pemerintahan mukim yang berada di bawah kecamatan dan di atas pemerintahan *gampong* menjadi struktur pemerintahan unik yang diakui oleh negara dan hanya berlaku di Aceh saja (Manalu, Nasution et. All, 2018). Dinamika kelembagaan di masa lampau yang relatif mampu mengatur kehidupan sosio-kultural masyarakat secara adil dan bijaksana dipandang relevan untuk diaplikasikan pada kehidupan masa kini. Padahal, konteks kebijakan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh sekarang telah jauh berbeda. Harus diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan Mukim di Aceh saat ini pun penuh dinamika dan terkesan problematik. Akibatnya, Mukim belum mampu memberi peran yang signifikan sesuai tugas dan fungsi formalnya.

Mukim pada saat ini diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang memiliki tugas dan fungsi di bagian pemerintahan serta tugas dan fungsi di bagian adat. Fungsi-fungsi ini kemudian kerap mengundang persoalan baru karena kebijakan yang menuntut Mukim bergerak pada dua wilayah yang berbeda dan berpotensi terjadinya friksi. Pada saat ini, transformasi Mukim menjadi lembaga formal dalam sistem pemerintahan masih membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan dan pengakuan dari negara. Pasalnya hak ulayat mukim dan kewenangan yang telah diatur dalam UUP A dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim masih membutuhkan kajian sinkronisasi dan adaptasi dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada sebelumnya. Apalagi, tata kelola pemerintahan Mukim di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Aceh saat ini dipastikan berbeda satu sama lain mengingat kondisi geografis, potensi sumber daya alam yang beragam dan kemampuan masing-masing Mukim yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Singkil yang terbentuk melalui undang-undang Nomor 14 tahun 1999 sangat mendukung keberadaan dan fungsi dari mukim sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan adat istiadat dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam, sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Aceh Singkil yang berlimpah, meminimalisir konflik antar kerukunan antar umat beragama, menegakkan syari'at islam, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseriusan ini terlihat dengan dikeluarkannya Qanun No 4 Tahun 2006 tentang pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Singkil

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian Peranan Mukim dalam sistem Perintahan di Kabupaten Aceh Singkil ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Maret 2019

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Dalam pelaksanaan penelitian didasarkan pada pengumpulan data di tempat penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan mengenai peranan mukim di sistem pemerintahan kabupaten Aceh Singkil. Dimana ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektifitas peranan dari mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. pengalokasian dana desa dengan sebaik- baiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Peranan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Penelitian ini menggunakan 7 variabel untuk mengukur sikap responden terhadap efektifitas peranan mukim pada sistem pemerintahan. Efektivitas keberadaan kelembagaan hasil tanggapan dari responden yaitu dapat dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian keefektivan yang kemudian diuraikan secara deskriptif (Kinandung, 2012). Penentuan skor tersebut menggunakan skala *Likert*. Pengukurannya dilakukan dengan menghadapkan seorang responden pada beberapa pertanyaan, kemudian responden tersebut diminta untuk memberikan jawaban atau tanggapan yang terdiri dari tiga tingkatan dalam skala tersebut. Jawaban-jawaban tersebut diberikan skor 1-3 dengan pertimbangan skor terbesar adalah tiga (3) untuk jawaban yang paling mendukung dan skor terendah adalah satu (1) untuk jawaban yang tidak mendukung. Berdasarkan perolehan skor dari responden, selanjutnya ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan efektivitas keberadaan kelembagaan. Selengkapnya tanggapan responden terhadap efektifitas Peranan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh singkil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5.1 Distribusi Variabel Responden dan Total Skor Responden

No	Keterangan Tolak Ukur	Skor	Jumlah responden	Total Skor
1	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pendapatan masyarakat/aparatur pemerintahan			
	Tidak Efektif	3	6	18
	Kurang Efektif	2	21	42
	Cukup Efektif	1	6	6
2	Keberadaan mukim dapat meningkatkan kesempatan kerja.			
	Tidak Efektif	3	2	6
	Kurang Efektif	2	27	54
	Cukup Efektif	1	4	4
3	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pembangunan .			
	Tidak Efektif	3	8	24
	Kurang Efektif	2	21	42
	Cukup Efektif	1	4	4
4	Keberadaan mukim dapat meningkatkan budaya daerah.			
	Tidak Efektif	3	13	39
	Kurang Efektif	2	0	0
	Cukup Efektif	1	20	20
5	Keberadaan mukim dapat meningkatkan pendidikan aparatur pemerintahan			
	Tidak Efektif	3	2	6
	Kurang Efektif	2	16	32
	Cukup Efektif	1	15	15
6	Keberadaan mukim dapat meningkatkan eksistensi lembaga mukim.			
	Tidak Efektif	3	15	45
	Kurang Efektif	2	11	22
	Cukup Efektif	1	7	7
7	Keberadaan mukim dapat meningkatkan eksistensi aparatur pemerintahan			
	Tidak Efektif	3	13	39
	Kurang Efektif	2	19	38
	Cukup Efektif	1	1	1
Total				464

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan semua skor tolak ukur diperoleh skor sebesar 464 dari total skor maksimum sebesar 692. Angka ini menunjukkan bahwa efektifitas peranan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil menurut responden dinilai kurang efektif.

Tolak ukur efektivitas peranan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dinilai dari total skor antara peranan mukim dalam meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, pembangunan, kebudayaan daerah, pendidikan, eksistensi lembaga mukim, dan eksistensi aparatur pemerintahan. Sementara itu tolak ukur yang mendapat penilaian kurang baik dari para responden adalah peranan mukim dalam meningkatkan eksistensi lembaga mukim. Hal tersebut dapat dilihat dari total skor atau persentase yang cukup rendah dibanding tolak ukur lainnya. Hasil wawancara

dengan para responden diketahui bahwa saat ini intitusi mukim sudah menjadi kabur dalam sistem pemerintah kita, meskipun ada dan didukung oleh qanun/perda namun fasilitas, sarana dan prasarana kepala mukim dan kantor mukim belum tersedia dengan baik bahkan ketersediaan anggaran mukim itu sendiri juga belum di anggarkan. Disisi lain berdasarkan observasi dan wawancara dari kepala mukim di jelaskan bahwa peran dan fungsinya dalam sistem pemerintahan tidak berjalan efektif hal ini dapat dilihat bahwa kepala mukim tidak diberi wewenang dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan dalam musrembang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan kepala mukim tidak diberi wewenang dalam pengesahan APB-kam (Laniari & Muda, 2016).

Peran mukim ditengah masyarakat hanya sebatas dalam kegiatan adat dan sosial budaya, seperti mukim bertindak sebagai kepala adat dalam adat istiadat pernikahan, kematian, begitu juga mukim sebagai penengah dalam perselisihan / konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Responden untuk analisis SWOT ditentukan secara sengaja (*purposive*). Responden berjumlah Empat Belas orang terdiri dari Asisten 1 Pemerintahan Setda Kab. Aceh Singkil, Sebelas orang Camat lingkup pemerintahan Kab. Aceh Singkil, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh masyarakat.

Identifikasi faktor internal adalah mengidentifikasi faktor dalam yang mempengaruhi Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, baik pengaruhnya positif (mendukung) maupun berpengaruh negatif (menghambat). Faktor internal yang mendukung disebut faktor kekuatan (*Strength*) dan faktor internal yang menghambat disebut dengan faktor kelemahan (*Weakness*). Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, baik yang berpengaruh positif (mendukung) maupun yang berpengaruh negatif (menghambat). Faktor yang mendukung disebut faktor peluang (*Opportunities*) dan faktor eksternal yang menghambat disebut faktor ancaman (*Threat*). Setelah dilakukan penelitian ke lapangan terhadap Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6.1 Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength) (S)	No	Kelemahan (Weaknes) (W)
1	Adanya Regulasi/peraturan yang jelas tentang keberadaan mukim	1	Belum memiliki struktur manajemen yang baku
2	Sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD	2	Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional,
3	Desentralisasi pemerintahan desa	3	Tidak memiliki dana operasional
Faktor Eksternal			
Peluang (Opportunity) (O)		No	Ancaman (Treat) (T)
1	Kerja sama koordinasi antar instansi	1	Pesatnya dinamika kehidupan dan pertumbuhan Penduduk

2	Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa	2	Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab
---	---	---	---

Kekuatan (*Strength*)

- a. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1999 dan keberadaan Mukim sendiri diatur dalam Qanun No 4 tahun 2012.
- b. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD untuk menggerakkan pembangunan dan pemerintahan, namun belum dikembangkan secara optimal.
- c. Dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, desa merupakan unit otonom terkecil yang diberi wewenang untuk mengatur pemerintahan desa untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi pedesaan

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kabupaten Aceh Singkil masih kekurangan personil yang memiliki kualifikasi yang tepat dan merata di dalam menjalankan pemerintahan *mukim*, sehingga lembaga-lembaga *mukim* belum dapat berjalan secara optimal, sehingga kebutuhan untuk pemenuhan struktur manajemen belum dapat terpenuhi
- b. Rentang kendali manajemen, personil dan tata laksana yang terlalu birokratis, sehingga masih diperlukan upaya restrukturisasi lembaga *mukim* sehingga berjalan secara optimal
- c. Terbatasnya anggaran, sehingga masih banyak pimpinan lembaga *mukim* belum memiliki kesempatan mengikuti penataran/diklat yang menunjang pengembangan lembaga *mukim*.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Meningkatnya sistem kerja sama koordinasi antar instansi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dalam rangka melaksanakan pembangunan otonomi daerah.
- b. Dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber dana desa untuk kemakmuran masyarakat desa

4. Tantangan (*Treat*)

- a. Pesatnya dinamika kehidupan dan pertumbuhan penduduk serta makin berkembang pelaksanaan pemerintahan Kabupaten aceh singkil merupakan tantangan untuk memberikan pelayanan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat pada saat ini. Pada sisi lain, diperlukan keseimbangan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah, termasuk pada lembaga *mukim*.
- b. Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sebagai akibat dari mekanisme hubungan pusat dan daerah yang belum sepenuhnya desentralisasi. Kondisi ini menciptakan keraguan dan bahkan konflik kepentingan antara pusat dan daerah

Analisis Matriks IFE

Dari hasil pembobotan dan penentuan rating maka dapat diperoleh nilai dari IFE sebagai berikut :

Tabel 4.6.2 Matriks IFE

Faktor-faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Nilai/Skor
1	2	3	4
Strengths (S)			
Adanya Regulasi/peraturan yang jelas tentang keberadaan mukim	0.16	3.5	0.56
Sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD	0.16	2.9	0.45
Desentralisasi pemerintahan desa	0.17	3.0	0.50
Sub total			1.51
Weaknesses (W)			
Belum memiliki struktur manajemen yang baku	0.17	-3.0	-0.51
Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional,	0.18	-3.0	-0.54
Tidak memiliki dana operasional	0.17	-3.0	-0.50
Sub total			-1.54
Total			-0.03

Sumber : Lampiran 6

Hasil akhir analisis matriks IFE untuk elemen kekuatan dan kelemahan untuk elemen kekuatan diperoleh dari nilai indeks akumulatif skor sebesar 1,51, sedangkan nilai akhir bobot skor untuk kelemahan sebesar -1.54. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan pandangan yang rendah pada faktor kekuatan dan respon yang relatif tinggi untuk faktor kelemahan. Sedangkan untuk total nilai bobot skor faktor strategis internal sebesar -0.03. Melihat hasil tersebut, menunjukkan bahwa peranan Mukim dalam sistim pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil di bawah rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai bobot skor untuk elemen kekuatan lebih kecil dari nilai bobot skor elemen kelemahan, maka dapat kita katakan bahwa efektifitas peranan Mukim dalam sistim pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil belum mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis Matriks EFE

Dari hasil pembobotan dan penentuan rating maka dapat diperoleh nilai dari EFE sebagai berikut :

Tabel 4.6.2 Matriks EFE

Faktor-faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Nilai/Skor
1	2	3	4
Opportunities (O)			
kerja sama koordinasi antar instansi	0.25	3.2	0.81
Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Dana Desa	0.24	3.0	0.73
Sub total			1.54
Treaths (T)			
Pesatnya dinamika kehidupan dan pertumbuhan Penduduk	0.23	2.8	0.65
Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab	0.27	2.9	-0.80

Sub total	-1.45
Total	0.09

Sumber : Lampiran 7

Hasil akhir analisis matriks EFE untuk elemen peluang dan ancaman untuk elemen peluang diperoleh dari nilai indeks akumulatif skor sebesar 1,54, sedangkan nilai akhir bobot skor untuk ancaman sebesar -1,45. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan pandangan yang cukup tinggi pada faktor peluang dan respon yang relatif kecil untuk faktor ancaman. Sedangkan untuk total nilai bobot skor faktor strategis eksternal sebesar 0,09. Melihat hasil tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas peranan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil di bawah rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai bobot skor untuk elemen peluang lebih besar dari nilai bobot skor elemen ancaman, maka dapat kita katakan bahwa efektivitas peranan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil mampu memanfaatkan peluang sebaik mungkin.

Analisis Matriks SWOT

Matriks SWOT merupakan matriks *matching tool* yang membantu untuk mengembangkan empat tipe strategi untuk penyempurnaan strategi baru penyaluran dana usaha desa/kelurahan yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO adalah menggunakan kekuatan internal Program PMUK untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar Program PMUK. Strategi WO adalah memperkecil kelemahan-kelemahan internal Program PMUK dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ST adalah Program PMUK berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Terakhir, strategi WT adalah merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Strategi yang dikembangkan untuk penyempurnaan/membentuk strategi baru penyaluran dana usaha desa/kelurahan untuk masing-masing tipe strategi ditunjukkan pada Gambar berikut ini :

Faktor Internal	<i>Strengths (S)</i> Kekuatan	<i>Weaknesses (W)</i> Kelemahan
Faktor Eksternal	Adanya Regulasi/peraturan yang jelas tentang keberadaan mu Sumber-sumber daya yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD Desentralisasi pemerintahan Desa	Belum memiliki struktur manajemen yang baku Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional, Tidak memiliki dana operasional

<p><i>Opportunities (O)</i> Peluang Kerja sama koordinasi antar instansi Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Dana Desa</p>	<p><i>Strategi SO</i> Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan pemanfaatan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p><i>Strategi WO</i> Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan <i>mukim</i> dan pemberdayaan lembaga <i>mukim</i> melalui Bimtek memperkuat struktur lembaga <i>mukim</i></p>
<p><i>Threats (T)</i> Ancaman Pesatnya dinamika kehidupan pertumbuhan penduduk Belum memadainya pelaksanaan otonomi daerah</p>	<p><i>Strategi ST</i> Pelaksanaan wewenag desa untuk pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab</p>	<p><i>Strategi WT</i> Peningkatan peran mukim sebagai lembaga penengah/penyelesaian konflik adat ditengah masyarakat</p>

Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT didapatlah enam strategi, yaitu:

- Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait
- Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek
- memperkuat struktur lembaga *mukim*
- Pelaksanaan wewenag desa untuk pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab
- Peningkatan peran mukim sebagai lembaga penengah/penyelesaian konflik adat ditengah masyarakat

Dalam diagram SWOT penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan antara faktor internal Peluang (*Opportunities*) dan ancama (*threats*), dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Berdasarkan hasil analisis matrik IFE dan EFE dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.6.7 : Hasil analisis matrik IFE dan EFE

Keterangan	Nilai Matrik
Internal	
-Kekuatan	1.51
- Kelemahan	-1.54
Total Matrik	-0.03
Eksternal	
- Peluang	1.54
- Ancaman	-1.45
Total Matrik	0.09

Sumber : Lampiran 6 dan 7

Strategi yang dapat digunakan pada strategi penguatan keberadaan peran mukim pada sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil terletak pada kuadran III Mendukung Strategi *Turn Around Organisasi* yaitu dengan memanfaatkan peluang, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Focus strategi ini

adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat memberikan peluang besar yang lebih baik. Dengan rekomendasi strategi adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek
- b. Memperkuat struktur lembaga *mukim*

Responden untuk analisis SWOT ditentukan secara sengaja (*purposive*). Responden berjumlah Empat Belas orang terdiri dari Asisten 1 Pemerintahan Setda Kab. Aceh Singkil, Sebelas orang Camat lingkup pemerintahan Kab. Aceh Singkil, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh masyarakat.

Identifikasi faktor internal adalah mengidentifikasi faktor dalam yang mempengaruhi Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, baik pengaruhnya positif (mendukung) maupun berpengaruh negatif (menghambat). Faktor internal yang mendukung disebut faktor kekuatan (*Strength*) dan faktor internal yang menghambat disebut dengan faktor kelemahan (*Weakness*). Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, baik yang berpengaruh positif (mendukung) maupun yang berpengaruh negatif (menghambat). Faktor yang mendukung disebut faktor peluang (*Opportunities*) dan faktor eksternal yang menghambat disebut faktor ancaman (*Threat*).

Matriks SWOT merupakan matriks *matching tool* yang membantu untuk mengembangkan empat tipe strategi untuk penyempurnaan strategi baru penyaluran dana usaha desa/kelurahan yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO adalah menggunakan kekuatan internal Program PMUK untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar Program PMUK. Strategi WO adalah memperkecil kelemahan-kelemahan internal Program PMUK dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ST adalah Program PMUK berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Terakhir, strategi WT adalah merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT didapatlah enam strategi, yaitu:

1. Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait
2. Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek
4. memperkuat struktur lembaga *mukim*
5. Pelaksanaan wewenag desa untuk pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab
6. Peningkatan peran mukim sebagai lembaga penengah/penyelesaian konflik adat ditengah masyarakat

Dalam diagram SWOT penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat

ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan antara faktor internal Peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*threats*), dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Strategi yang dapat digunakan pada strategi penguatan keberadaan peran mukim pada sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil terletak pada kuadran III Mendukung Strategi Turn Around Organisasi yaitu dengan memanfaatkan peluang, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Focus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat memberikan peluang besar yang lebih baik. Dengan rekomendasi strategi adalah Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek; dan Memperkuat struktur lembaga *mukim*.

SIMPULAN

Efektifitas dari peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah sebagai berikut: Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait; Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *mukim* dan pemberdayaan lembaga *mukim* melalui Bimtek; memperkuat struktur lembaga *mukim*; Pelaksanaan wewenang desa untuk pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara menyeluruh dan bertanggung jawab; Peningkatan peran mukim sebagai lembaga penengah/penyelesaian konflik adat ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assaf, A. F. (2009). Mutu Pelayanan Kesehatan (Prespektif Internasional) Kedokteran, Jakarta: EGC.
- Balitbang Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI
- Dumpapa, Y. (2010). Hubungan Lokasi, Biaya, Personil dan Informasi Rumah Sakit Dengan Keputusan Memilih Rawat Inap di RSUD Bitung. Manado: Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi
- Gasperz, V. (2011). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiyansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Disertai Dengan Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasi. Yogyakarta; Gava Media.
- Kasmir. (2006). Etika Costumer Service. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Khairani, L. (2010). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD Pasaman Babat", Jurnal Ilmu Manajemen, diposting dari [http:// www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id).
- Lestari, W.P, (2014), "Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepuasan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul", Jurnal Kedokteran Indonesia, di posting dari <http://jounal.uui.ac.id>
- Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta; Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Mukarom, Z & Muhibudin Wijaya Laksana. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rahmayanti, N. (2010). Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto & Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, A.A & dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Averroes Press.
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: Rafika Aditama.

- Sinambela, Lijan Poltak. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2011). Service Management, Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi.
- . (2009). Total Quality Management. Yogyakarta: Andi.
- Jaffisa, T., Kadir, A. & Dumasari H., (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 7 (1): 94-93
- Kinandung, R., (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah (Studi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 1 (1): 35-51
- Manalu, M. Nasution, H.T. Nasution, I. (2018). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara, PERSPEKTIF, 7 (2): 55-59.
- Laniari, M., & Indra M.H., (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (2): 131-142

Undang-Undang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.